

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD)
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

Zulkifli¹⁾, Makmur²⁾

¹⁾Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, ²⁾Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian
email: zulkifli@upp.ac.id, makmur_melay@yahoo.com.

Abstract

The research is an evaluational study on the empowerment of Program village Performing at Rokan Hulu Regency Upstream, it was performed on december 2013 until May 2014. The aims of this research is subject know the empowerment Program village performing at Village Rambah, and to analyse the credit channelizing by UED – SP . This research was a case study on Economic Effort Saving and Lending Kumu Jaya Village Rambah, with 60 persons, used random simpling. From the finding, it was found that the program has been applied well as the rules determined.

Keywords: Village Empowerment Program

Abstrak

Penelitian tentang studi Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Kabupaten Rokan Hulu, telah dilaksanakan pada bulan Desember 2013 sampai Mei 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Rambah, dan menganalisis penyaluran kredit oleh UED – SP kepada pemanfaat. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambah, dengan responden pemanfaat dana UED-SP yaitu sebanyak 60 orang, yang diambil secara acak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan : Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Kata Kunci : Program Pemberdayaan Desa

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Desember 2012 mencapai 28,59 juta orang (11,66%), menurun dibanding Maret 2012 yang tercatat 29,13 juta orang (11,96%), (BPS dalam Antara News 2/1/2013). Program penanggulangan kemiskinan (*pro-poor growth policy*) telah banyak dilakukan, baik secara nasional, ditingkat propinsi maupun yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota. Namun sering pada sasaran yang tidak semestinya menerima. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2003, (Kamira, dkk 2011 dalam Elfindri, 2008) ada beberapa aspek yang menyebabkan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini berjalan tidak efektif, yaitu :

- a. kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan setiap program masih terbatas;
- b. masih terbatasnya database kemiskinan sehingga sulit menjadikan

- program tepat sasaran dan pengawasan program masih lemah;
- c. kebanyakan program pengentasan kemiskinan terutama yang dibiayai pemerintah dan lembaga donor menggunakan *project to project* basis sehingga sulit menghasilkan proyek yang berkelanjutan;
- d. masih maraknya praktek-praktek korupsi di Indonesia;
- e. kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Ada beberapa faktor penting yang menyebabkan kesulitan dalam menilai dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia dan kebanyakan negara berkembang. Faktor tersebut antara lain adalah : tidak tepatnya dalam menetapkan sasaran, tidak berurutan waktu program, kurang pahamiannya tenaga pemerintah dalam melaksanakan, termasuk korupsi, kurangnya persiapan tenaga dalam

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD)
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

mendampingi program, kecilnya bentuk bantuan dan kurangnya informasi (Kamira, dkk 2011 dalam Elfindri, 2005).

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau mulai Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 (dalam Juta Jiwa) dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Riau 2004-2008

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2003	661,7 Ribu Jiwa	15,6% Dari Total Penduduk
2004	1.008,163 Ribu Jiwa	22,19 % Dari Total Penduduk
2007	574.5 Ribu Jiwa	11,20 % Dari Total Penduduk
2008	566.7 Ribu Jiwa	10,63 % Dari Total Penduduk

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2008

Tabel 2. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau Menurut Daerah, tahun 2002-2008

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2002	n.a	n.a	635,0	n.a	n.a	15,39
2003	n.a	n.a	660,7	n.a	n.a	14,97
2004	n.a	n.a	658,6	n.a	n.a	14,67
2005	199,9	400,5	600,4	8,26	16,82	12,51
2006	226,3	338,6	564,9	9,37	14,40	11,85
2007	246,4	328,1	574,5	9,53	12,90	11,20
2008	245,1	321,6	566,7	9,12	12,16	10,63

Sumber : BPS, Diolah dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini sangat diperlukan suatu proses pemberdayaan, dimana keberdayaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung sebagai prasyaratnya. Diantaranya adalah faktor pendidikan, kesehatan, penguasaan akses sumber-sumber kemajuan ekonomi dan faktor sosial budaya.

Desa Rambah dengan ibu negerinya di Kumu berdiri sejak tahun 2000 dengan luas wilayah lebih kurang 44,54 Km².

Program Pemberdayaan Desa, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) masuk ke Desa Rambah sekitar Bulan Mei tahun 2011. Desa Rambah memperoleh dana sebesar Rp 500.000.000 dari APBD Provinsi Riau. Setelah melalui beberapa proses yang dimulai dari Musyawarah Desa (MD), Musyawarah Dusun (Musdus), dilanjutkan dengan pencairan dari Bank Riau Kepri dan penyerahan kepada masyarakat (Pemanfaat) dalam bentuk kredit.

Perkembangan Dana UED-SP Kumu Jaya Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2013 Selengkapnya dapat dilihat pada tabel.3 dibawah ini.

Tabel 3. Perkembangan Dana UED-SP Kumu Jaya Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2013.

No	Uraian	Keterangan	Jumlah
1	Dana Awal dari Provinsi Riau	Rp 500.000.000	
2	Jumlah Pemanfaat dan Perkembangan Transaksi		
a	Perdagangan	61 orang	Rp 574.000.000
b	Pertanian	1 orang	Rp 5.000.000
c	Perkebunan	108 orang	Rp 749.000.000
d	Perikanan	-	-
e	Peternakan	-	-
f	Industry Kecil	2 orang	Rp 11.000.000
g	Jasa	14 orang	Rp 125.000.000
3	Jumlah Total	186 orang	Rp 1.464.000.000
4	Perkembangan Dana	Rp	97.504.445
5	Kas	Rp	74.000.000
6	Bank	Rp	86.797
7	Tingkat Pengembalian		98%
8	Tunggakan	Rp	38.952.222
9	Dana Beredar di Masyarakat	Rp	490.243.000
10	Total SHU	Rp	45.897.353
11	PADes	Rp	4.589.736

Sumber: UED-SP Kumu Jaya Desa Rambah Tahun 2013

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat sebenarnya mengacu pada kata “*Empowerment*”, yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat pedesaan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri.

Lebih lanjut Payne (1997:266), mengatakan bahwa: “*Empowerment seeks to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients*”. (Pemberdayaan dipandang untuk menolong klien dengan membangkitkan tenaga dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan sepanjang hidup, termasuk mengurangi efek atau akibat dari gejala-gejala pada masyarakat atau individu untuk melatih agar kekuatan itu tumbuh dengan meningkatkan kapasitas percaya diri, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people centered development*) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat pedesaan terhadap lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*), yang melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (*community based resource management*).

Menurut Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggungjawab atas tindakannya.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai *alternative*, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara

berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah suatu penilaian berkala terhadap *relevansi*, prestasi, efisiensi dan dampak proyek dalam konteks tujuan yang telah disepakati. Evaluasi memanfaatkan sistem informasi. Sistem tersebut termasuk fisik dasar, catatan keuangan, rincian, masukan dan pelayanan yang disediakan untuk para pemanfaat (misalnya kredit dan penyuluhan) tetapi dengan suatu pandangan terhadap

perbandingannya dari waktu ke waktu terhadap informasi kontrol yang diperbandingkan (Casley, 1991).

Program Pemberdayaan Desa (PPD)

Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. **Program Pemberdayaan Desa (PPD)** merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau.

Seluruh proses kegiatan dalam PPD pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

- a. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
- b. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
- c. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan Khusus PPD

Tujuan dilaksanakannya Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau secara khusus adalah untuk :

- a. Mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa/kelurahan.
- b. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- c. Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan.

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD)
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

- d. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir.
- e. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- f. Meningkatkan kebiasaan gotong-royong dan gemar menabung secara tertib.
- g. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan.
- h. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah:

- a. Berkembangnya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi perdesaan/kelurahan yang sehat dan berdaya saing tinggi.
- b. Terpenuhinya kebutuhan dasar sarana dan prasarana penunjang ekonomi, pendidikan dan infrastruktur desa/kelurahan melalui pembangunan yang tumbuh dari bawah (*Bottom Up*) yang diimplementasikan oleh seluruh Dinas Instansi Sektorial baik provinsi maupun kabupaten/kota.
- c. Melembagakan sistem perencanaan partisipatif di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui peran aktif Dinas dan Sektorial.

Jenis Kegiatan PPD

Dalam implementasinya jenis kegiatan pada Program Pemberdayaan Desa meliputi :

- a. Kegiatan reguler perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui Sektorial.
- b. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan – Simpan Pinjam (UED/K-SP).

Untuk menjamin pemahaman mekanisme dan tujuan program, maka sosialisasi program wajib dilaksanakan oleh Penanggungjawab Pelaksana Program baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Evaluasi Program PPD

Kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana perkembangan /kemajuan yang telah dicapai dalam melaksanakan program selama periode tertentu. Evaluasi dapat dilakukan secara parsial atau secara menyeluruh seluruh aspek pelaksanaan PPD yang memuat data serta analisa yang menyeluruh, sistematis serta objektif, untuk mengukur tingkat keberhasilan PPD sebagai sebuah program unggulan dalam mendukung upaya menanggulangi masalah Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur (K2I) di Provinsi Riau. Dasar utama dalam evaluasi kinerja ini menggunakan Pedoman Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Desa (PPD) sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau NO.KPTS.537/XII/2005 tentang Penetapan Pedoman Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, yang ditandatangani oleh Gubernur Riau tanggal 13 Desember 2005.

Evaluasi Internal

Evaluasi internal PPD bertujuan, antara lain:

- Mengetahui capaian yang telah diperoleh selama berlangsungnya program, terutama menyangkut ketiga aspek PPD, yaitu Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Ekonomi, dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/ Kelurahan.
- Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan oleh program. Mencari

akar permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut.

Evaluasi internal diperlukan sebagai bahan masukan bagi perbaikan kinerja program ke depan, biasanya dilakukan pada tahun pertama, kedua dan ketiga pelaksanaan PPD.

Mendapatkan sudut pandang sama dalam melakukan penilaian terhadap program, maka telah dibuat Panduan Evaluasi Kinerja PPD yang berisikan indikator-indikator yang harus dicapai selama tahun pertama, kedua dan ketiga pelaksanaan program.

Evaluasi Eksternal

Evaluasi eksternal merupakan tindak lanjut dari evaluasi internal. Evaluasi eksternal biasanya dilakukan oleh tim evaluasi independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.

Pelaksanaan evaluasi eksternal pada PPD direncanakan setelah 3 tahun (satu siklus) pelaksanaan program. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja program secara keseluruhan dan untuk mengetahui dampak program terhadap perkembangan masyarakat desa/kelurahan lokasi PPD

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Lokasi dan Waktu penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, Penelitian ini bersifat kualitatif. Lokasi penelitian Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambah kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2014.

Fokus Kajian

Fokus Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan

Desa (PPD) ditetapkan berdasarkan buku Pedoman Umum dan Buku Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau. Yang menjadi Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu: Sosialisasi, Penggunaan Dana, Manfaat, Pembinaan, Monitoring, Sasaran/Penerima Dana, Tingkat Pengembalian.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini mencakup data primer dan datasekunder. Data sekunder diperoleh dari survey awal. Sedangkan data primer diperoleh di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, serta angket (*Questionnaire*).

Metode Pengambilan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemanfaat dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambah dengan jumlah populasi sebanyak 186 orang, dari jumlah tersebut diambil sampel sebanyak 60 orang pemanfaat yang dipilih secara acak sederhana.

Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dilapangan diidentifikasi, diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan fokus kajian yang telah diteliti sehingga dapat menjelaskan bagaimana kondisi pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Rambah. Hasil analisis pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Rambah dibandingkan dengan buku pedoman/petunjuk, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan program tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Pemanfaat UED-SP

Karakteristik pemanfaat yang dibahas dalam penelitian ini meliputi, umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan pekerjaan. Umur dapat memberikan gambaran tentang kemampuan fisik seseorang dalam berusaha dan bekerja, jenis kelamin melihat seberapa jauh keterlibatan gender dalam program, pendidikan dan pekerjaan menentukan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dana dan peruntukan dana. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Distribusi Umur, Pendidikan, Jenis Kelamin dan Pekerjaan

No	Karakteristik Responden	Jumlah	
		n	Persentase (%)
1	Umur(Tahun)		
	26 - 35	16	26,67
	36 - 45	21	35,00
	46 - 55	14	23,33
	> 55	9	15,00
	Jumlah	60	100%
2	Pendidikan		
	SD	28	46,67
	SMP/ Sederajat	13	21,67
	SMA/ Sederajat	15	25,00
	D1 - S1	4	6,67
	Jumlah	60	100%
3	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	45	75,00
	Perempuan	15	25,00
	Jumlah	20,95	
4	Jenis Pekerjaan		
	Tani	14	23,33
	Swasta	32	53,33
	PNS	5	8,33
	Ibu Rumah Tangga	9	15,00
	Jumlah	60	100%

Umur

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas umur pemanfaat UED-SP kumu Jaya Desa Rambah berusia antara 36-45 tahun. yang berarti pemanfaat tergolong kelompok usia produktif.

Hal ini sesuai dengan pendapat simanjuntak (1999) yang mengatakan bahwa penduduk umur 15 - 55 tahun termasuk kedalam usia produktif, dimana pada golongan usia ini akan lebih mudah menerima inovasi yang

didukung oleh kemampuan fisik dan kemampuan berfikir yang baik. Disamping itu, usia seseorang yang produktif akan membuat seseorang lebih mudah dalam menerima teknologi baru, bila dibandingkan dengan usia non produktif.

Pendidikan

Tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan daya nalar dan sikap atau perilaku pemanfaat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka cenderung usaha yang dikelola lebih rasional dengan memanfaatkan pendidikan yang dimiliki baik yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal.

Tingkat pendidikan pemanfaat cenderung bervariasi, tingkat pendidikan pemanfaat berkisar dari Sekolah Dasar (SD) sampai jenjang pendidikan Diploma dan Strata 1,

Dari Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan pemanfaat yang terbanyak adalah SD berjumlah 28 orang (46,67%), diikuti SMA/ sederajat 15 orang (25,00%), SMP/ sederajat 13 orang (21,67%), sedangkan Diploma-Sarjana hanya 4 orang (6,67%). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaat UED-SP kumu Jaya Desa Rambah tingkat pendidikannya masih rendah yaitu hanya Sekolah Dasar.

Jenis Kelamin

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaat dana UED-SP Kumu Jaya Desa Rambah masih didominasi oleh kaum laki-laki yaitu sebanyak 45 orang (75,00%), sedangkan kaum perempuan hanya sebanyak 15 orang (15,00%). Hal ini menjadi perhatian yang serius bagi pihak-pihak terkait, karena keterwakilan perempuan dalam program UED-SP menjadi syarat yang mutlak. Program mempersyaratkan

bahwa pemanfaat dan pengelola UED-SP harus melibatkan kaum perempuan.

Jenis Pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pemanfaat dalam mengambil keputusan untuk menggunakan dana yang dipinjamnyaguna mendapatkan hasil yang lebih baik serta mengurangi resiko kegagalan yang mungkin dialaminya. Pada umumnya pemanfaat dalam menggunakan dana melakukan usahaselalu berpedoman padapekerjaan yang dilakukanya sehari-hari.

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pemanfaat yang meminjam dana di UED-SP Kumu Jaya Desa Rambah adalah swasta, Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan program pemberdayaan masyarakat yaitu memberikan pinjaman kredit untuk pengembangan usaha kecil dan menengah.

Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Program PPD dengan Ketentuan

Analisis kesesuaian pelaksanaan program adalah membandingkan antara pelaksanaan program dengan apa yang seharusnya menurut ketentuan. Ketentuan yang dipedomani dalam mengevaluasi adalah buku Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis PPD yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau.

Sosialisasi Program

Tanggapan Responden yang Memahami Maksud dan Tujuan Program PPD, yang disampaikan dalam forum Musyawarah Desa/Kelurahan I dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Tanggapan Responden yang Memahami Maksud dan Tujuan Program PPD

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Paham	42	70,00%
2	Kurang Paham	14	23,55%
3	Tidak Paham	4	6,67%
Jumlah		60	100

Pada Tabel 4.2. memperlihatkan bahwa dari 60 orang responden, yangmemahami tentang maksud dan tujuan program Pemberdayaan Desa (PPD) sebanyak 42 orang (70,00%), sedangkan 14 orang (23,55%) diantaranya kurang memahami dan 4 orang (6,67%) tidak paham dengan maksud dan tujuan PPD.

Peruntukan Dana

Pemanfaat wajib membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan dan tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K). Perubahan-perubahan terhadap jenis usaha yang didanai melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan, harus melalui proses verifikasi dilengkapi dengan berita acara

Tabel 4.3 Tanggapan Responden yang Menggunakan Dana Bergulir Sesuai dengan rencana Kegiatan (SP2K).

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sesuai RUP	51	85,00%
2	Kurang Sesuai		
3	RUP Tidak Sesuai	3	5,00%
	RUP	6	10,00%
Jumlah		60	100

Pada Tabel 4.3. memperlihatkan bahwa dari 60 orang responden, yang menggunakan dana sesuai Rencana Usaha Pemanfaat (RUP) sebanyak 51 orang (85,00%), sedangkan 3 orang (5,00%) diantaranya kurang sesuai dengan RUP dan 6 orang (10,00%) tidak sesuai dengan RUP.

Manfaat

Tabel 4.4 Tanggapan Responden Terhadap Peningkatan Pendapatan Setelah Menggunakan Dana Bergulir

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Pendapatan Meningkat	47	78,33%
2	Kurang Meningkat	4	6,67%
3	Tidak Meningkat	9	15,00%
Jumlah		60	100

Berdasarkan Tabel 4.4. dapat dilihat bahwa dari 60 orang responden, yang pendapatannya meningkat setelah menggunakan dana UED-SP adalah sebanyak 47 orang (78,33%), sedangkan 4 orang (6,67%) diantaranya kurang meningkat dan 9 orang (15,00%) tidak meningkat pendapatannya.

Sedangkan data tentang perkembangan usaha responden setelah mendapatkan dana bergulir dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Tanggapan Responden Terhadap Perkembangan Usaha Setelah Menggunakan Dana Bergulir

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Berkembang	53	88,33%
2	Kurang Berkembang	5	8,33%
3	Tidak Berkembang	2	3,33%
Jumlah		60	100

Pada Tabel 4.5. memperlihatkan bahwa dari 60 orang responden, yang usahanya berkembang setelah mendapatkan dana UED-SP adalah sebanyak 53 orang (88,00%), sedangkan 5 orang (8,33%) diantaranya kurang berkembang dan 2 orang (3,33%) tidak berkembang.

Pendampingan Oleh Fasilitator/ Pendamping Desa

Perangkat Desa/Kelurahan, BPD, Pengelola UED/K-SP, Pendamping Desa harus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota/ kelompok Pemanfaat dana usaha desa.

Tabel 4.6 Tanggapan Responden Terhadap Pendampingan oleh Fasilitator

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Didampingi	29	48,33%
2	Kurang Didampingi	31	51,67%
3	Tidak Didampingi	0	0,00%
Jumlah		60	100

Dari Tabel 4.6. dapat dilihat bahwa dari 60 orang responden, yang merasa mendapat pendampingan oleh fasilitator adalah sebanyak 29 orang (48,33%), sedangkan 31 orang (51,67%) merasa kurang didampingi.

Berdasarkan hal diatas terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang merasa kurang mendapat pendampingan oleh fasilitator, untuk itu kedepannya peran fasilitator program lebih ditingkatkan lagi dalam mendampingi pemanfaat.

Bimbingan Oleh Pengelola

Tabel 4.7 Tanggapan Responden Terhadap Bimbingan oleh Pengelola

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Dibimbing	54	90,00%
2	Kurang Dibimbing	4	6,67%
3	Tidak Dibimbing	2	3,33%
Jumlah		60	100

Dari Tabel 4.7. dapat dilihat bahwa dari 60 orang responden, yang merasa mendapat bimbingan oleh pengelola adalah sebanyak 54 orang (90,00%), sedangkan 4 orang (6,67%) merasa kurang didampingi dan sebanyak 2 orang (3,33%) responden merasa tidak dibimbing.

Bimbingan yang dilakukan oleh pengelola wajib dilakukan minimal sekali dalam sebulan sesuai dengan petunjuk teknis program PPD, disamping itu juga pengelola wajib melakukan Rapat Koordinasi Desa (RAKORDES) sekali dalam sebulan.

Tabel 4.7 Tanggapan Responden terhadap Rapat Koordinasi Bulanan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Rutin Setiap Bulan	0	0,00%
2	Kadang-kadang	56	93,33%
3	Tidak Pernah	4	6,67%
Jumlah		60	100

Dari Tabel 4.7. dapat dilihat bahwa dari 60 orang responden, yang mengatakan diadakan rapat koordinasi setiap bulan tidak ada, (0,00%), sedangkan menyatakan rapat koordinasi diadakan tidak secara rutin sebanyak 56 orang (93,33%) dan mengatakan tidak pernah diadakan rapat koordinasi sebanyak 4 orang (6,67%).

Kesesuaian Penyaluran Dana

a. Penerima Pinjaman

Salah satu tujuan khusus dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/ kelurahan yang berpenghasilan rendah.

Tabel 4.8 Tanggapan Responden Terhadap Sasaran Penerima Pinjaman

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Tepat Sasaran	49	81,67%
2	Kurang Tepat Sasaran	6	10,00%
3	Tidak Tepat Sasaran	5	8,33%
Jumlah		60	100

Dari Tabel 4.8. dapat dilihat bahwa dari 60 orang responden, sebanyak 49 orang (81,67%) tepat sasaran, sedangkan 6 orang (10,00%) kurang tepat sasaran dan sebanyak 5 orang (8,33%) responden tidak tepat sasaran.

Pada Tabel 5.8. dapat disimpulkan bahwa mayoritas pemanfaat dana UED-SP sudah tepat sasaran.

Tingkat Pengembalian

Tabel 4.9 Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Pengembalian Pinjaman

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Lancar	33	55,00%
2	Kurang Lancar	19	31,67%
3	Tidak Lancar	8	13,33%
Jumlah		60	100

Tabel 4.9. memperlihatkan bahwa dari 60 orang responden, sebanyak 33 orang (55,00%) diantaranya lancar dalam pengembalian dan 19 orang (31,67%) kurang lancar, sementara 8 orang (13,33%) tidak lancar dalam pengembalian dana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini dapat dilihat dari tanggapan responden dari fokus kajian dengan 8 sub kajian, sebanyak 5 sub kajian dilaksanakan lebih dari 75% sesuai ketentuan yaitu: Penggunaan Dana, Manfaat, Perkembangan Usaha, Bimbingan Pengelola dan Sasaran Pemanfaat. sedangkan 3 lainnya dibawah 75%, terdiri dari: Sosialisasi, pendampingan oleh Fasilitator dan Tingkat Pengembalian.
2. Pelaksanaan penyaluran dana Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambah oleh Pegelola dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, semuanya dilaksanakan

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD)
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

lebih dari 75% sesuai dengan ketentuan.

*Padang Program Pasca Sarjana
Universitas Andalas Padang.*

Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk kemajuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambah, perlu diadakan perbaikan dalam pelaksanaan di lapangan terutama dalam sosialisasi program kepada pemanfaat. Disamping itu perlu meningkatkan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan oleh fasilitator program.
2. Dalam penyaluran dana bergulir, diharapkan agar pengurus Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kumu Jaya Desa Rambah agar lebih baik lagi dalam menyeleksi penerima pinjaman untuk mengurangi terjadinya tunggakan.
3. Diharapkan kepada pihak terkait agar bisa memberikan tambahan modal untuk mengurangi daftar antrian pemanfaat yang ingin menggunakan dana tersebut.

Elfindri, 2005. *Kajian Tingkat Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan Sumatera Barat, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Lembaga Pengkajian Ekonomi Pembangunan (LPEP), Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.*

Keputusan Gubernur Riau (2009). *Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau*

Moelyarto, Vidhyandika, (1996). *"Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT."* Dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (ed). 20. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.

Owin Jamasy (2004). *Keadilan Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*, Mizan Pustaka, Jakarta

Payne M. 1997. *Modern Social Work Theory*. Edisi Kedua. London: MacMillan Press Ltd.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau*

Slamet, Y. (1993). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

Sulistiyani Ambar Teguh (2004). *Kemiskinan dan Model pemberdayaan*, Gava Media Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2008

Caslay, Dennis J dan Khrisna Kumar (1991). *Pemanfaatan dan Evaluasi Proyek Pertanian*. Terjemahan, Jakarta UI .

Desi Kamira dkk (2011). *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kota*

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD)
DI KABUPATEN ROKAN HULU

Sumardjo (1999). *Transformasi Model
Penyuluhan Pertanian Menuju
Pengembangan Kemandirian
Petani Bogor*, Disertasi Doktor
Program Pascasarjan Institut
Pertanian Bogor